



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PENGUMUMAN NOMOR 87/KP.01.00/12/2022

### TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 359 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2022 memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan integritas, serta komitmen tinggi, untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

#### I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, MHPK, DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	JUMLAH FORMASI
1.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	S-1 Komunikasi/ D-IV Komunikasi	1	10
2.	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Teknik Informatika/ D-IV Teknik Informatika/ S-1 Manajemen Informatika/ D-IV Manajemen Informatika	1	10
3.	Arsiparis Terampil	D-III Kearsipan/ D-III Perpustakaan/ D-III Administrasi Perkantoran	5	12
<b>Total</b>				<b>32</b>

\*MHPK: Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh PPPK.

#### II. RENCANA PENEMPATAN FORMASI PPPK

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat:

- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Biro Umum.



### **III. PERSYARATAN PELAMARAN**

#### **A. Umum**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota POLRI, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a. Paling rendah Pejabat Administrator/Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah, dan
  - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya non pemerintah/ yayasan.
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).

#### **B. Khusus**

1. Khusus Ijazah perguruan tinggi luar negeri harus menyertakan persamaan ijazah dari Instansi yang berwenang.
2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75.
3. Perguruan Tinggi atau Program Studi terakreditasi minimal B.
4. Apabila memiliki project yang pernah dibuat dan masih digunakan (khusus untuk jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Humas Ahli Pertama) maka dapat dipresentasikan untuk menambah penilaian pada saat wawancara tatap muka.
5. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 21 Desember 2022.



#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Dokumen persyaratan terdiri dari :
  - 1) Surat lamaran ditujukan Kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, diketik menggunakan Komputer, menggunakan materai fisik/e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format Surat lamaran dapat diunduh dilaman: <https://bit.ly/P3KMK>)
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
  - 3) Ijazah dan Transkrip Nilai Ijazah Asli.
  - 4) Surat Pernyataan harus diketik menggunakan komputer, menggunakan materai fisik/e-materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://bit.ly/P3KMK>)
  - 5) Pas photo formal terbaru berlatar belakang warna merah berukuran 3 x lembar)
- b. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
- c. Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran dimulai pada tanggal 21 Desember 2022 s.d. 6 Januari 2023 (ditutup pukul 23.59 WIB).
- d. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dimulai pada tanggal 18 s.d. 22 Februari 2023.

#### V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi yaitu sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi.
- b. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* terdiri atas :
  - 1) Kompetensi Teknis
  - 2) Kompetensi Manajerial
  - 3) Kompetensi Sosial Kultural
- c. Seleksi Wawancara Tatap Muka.



## VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi :
  - a) Hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman <http://mkri.id>
  - b) Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Peserta Seleksi Kompetensi (CAT) dan Peserta Seleksi Wawancara Tatap Muka adalah peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi.
3. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil akumulasi nilai Seleksi Kompetensi (CAT) dan Seleksi Wawancara Tatap Muka yang lulus *passing grade* secara peringkat sesuai alokasi formasi yang dibutuhkan pada setiap jabatan.

## VII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman kelulusan akhir dilakukan melalui laman <http://mkri.id> pada tanggal 9 s.d 11 April 2023.
2. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi dilaksanakan di Jakarta.
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
7. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
8. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
9. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman <http://mkri.id>.



10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 dapat menghubungi: Tlp. (021) 2352 9000 (ext 18302) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Jakarta, 20 Desember 2022

Plt. Sekretaris Jenderal,

**Heru Setiawan**



*Digital Signature*

mk1015413954221221082952

**JADWAL  
PELAKSANAAN PENERIMAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>JUMLAH HARI</b>
1	Pengumuman Penerimaan	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023	15 hari
2	Pendaftaran seleksi penerimaan secara Online ( <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> )	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023	17 hari
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023	22 hari
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023	4 hari
5	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	16 s.d 18 Januari 2023	3 hari
6	Jawab Sanggah Seleksi Administrasi	19 s.d 25 Januari 2023	7 hari
7	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Masa Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023	3 hari
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023	5 hari
9	Penarikan Data Final	23 s.d 24 Februari 2023	2 hari
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023	5 hari
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023	6 hari
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT)	10 Maret s.d 3 April 2023	25 hari
13	Pelaksanaan Seleksi Wawancara Tatap Muka	20 Maret s.d 6 April 2023	18 hari
14	Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi (CAT)	26 Maret s.d 8 April 2023	14 hari
15	Pengumuman Kelulusan Akhir	9 s.d 11 April 2023	3 hari
16	Masa Sanggah Kelulusan Akhir	12 s.d 14 April 2023	3 hari
17	Jawab Masa Sanggah Kelulusan Akhir	14 s.d 20 April 2023	7 hari
18	Pengumuman Kelulusan Akhir Pasca Masa Sanggah	27 s.d 29 April 2023	3 hari
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023	23 hari
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023	29 hari

**Catatan :**

Apabila terdapat perubahan agenda dan informasi mengenai Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 akan disampaikan melalui laman <http://mkri.id>.

Plt. Sekretaris Jenderal,  
**Heru Setiawan**

